

BULETIN

BIOENERGI

Edisi September 2019

www.aprobi.or.id



MANDATORI B30 DIPERCEPAT

Penanggung Jawab
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia
(APROBI)

Dewan Redaksi
Pengurus APROBI

Alamat Redaksi
Multivision Tower, Lantai 11,
Jl Kuningan Mulia Lot 9B

**Buletin ini diterbitkan oleh
Asosiasi Produsen Biofuels
Indonesia (APROBI)**



*Redaksi menerima kiriman artikel
opini, naskah berita, foto, dan
karikatur. Naskah bisa dikirimkan
melalui pos ke Alamat Redaksi atau
melalui email: office@aprobi.or.id.
Redaksi berhak mengedit dan
mengubah tulisan tanpa mengubah
makna dari tulisan tersebut.*

Biofuelpedia

Sustainable Development Goals disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

tatap redaksi

MENJAGA NILAI TAMBAH BIODIESEL

Pembaca yang terhormat,

Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) menerbitkan buletin Bioenergi pada bulan September 2019. Buletin yang mulai dipublikasikan pemajak pertengahan tahun 2016 ini menginformasikan perkembangan terkini di industri biodiesel dan pada umumnya industri sawit.

Rubrik Laporan Utama, mengulas dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat peningkatan mandatori biodiesel menjadi campuran 30 % atau B30 yang dijadwalkan mulai 2020. Sebab, mandatori B20 dinilai sukses berjalan dari aspek penghematan devisa dan perlindungan lingkungan. Kendati demikian, pemerintah tetap menjunjung azas verifikasi dan transparansi sebelum B30 diketok palu. Uji jalan kendaraan berbahan bakar B30 tetap dijalankan supaya konsumen tidak kecewa memakai solar campuran B30.

Di Rubrik Tamu Kita, kami edisi ini mengulas komitmen Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto, untuk melindungi industri turunan sawit seperti biodiesel.

Kementerian Perindustrian menyatakan menjadikan industri hilir pengolahan minyak sawit sebagai sektor prioritas nasional. Hal ini sejalan dengan target pemerintah untuk pertumbuhan industri hilir kelapa sawit, sesuai Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2035.

Pembaca, kami harapkan buletin Bioenergi membantu penyebaran informasi positif mengenai peranan biodiesel kepada negara ini. Dengan begitu dukungan masyarakat terhadap industri biodiesel dapat terus meningkat dan memahami pentingnya kehadiran industri bioenergi. Selamat membaca.

**BULETIN
BIOENERGI**
Edisi September 2019 www.aprobi.or.id



MANDATORI B30 DIPERCEPAT

GAPKI BERKOMITMEN ANGGOTANYA BERSERTIFIKAT ISPO PADA 2020



JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menargetkan anggotanya bersertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) pada 2020. Komitmen ini diharapkan mampu memperkuat keberterimaan ISPO sebagai standar keberlanjutan di dunia internasional.

"Saat ini sudah 67% atau 502 perusahaan anggota GAPKI telah meraih sertifikasi ISPO. Dan target akhir tahun 2020 seluruh anggota GAPKI sudah sertifikasi ISPO," kata Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono dalam Deklarasi GAPKI dalam Mendukung Sertifikasi ISPO di Jakarta, Selasa (27/8). Deklarasi ini dibacakan Joko dan para Pengurus GAPKI di sela-sela acara penyerahan sertifikat ISPO.

Joko mengatakan sertifikasi ISPO sebagai standar wajib tata kelola perkebunan sawit di Indonesia sangat penting untuk menjawab berbagai tuduhan miring terhadap sektor sawit. Sehingga daya saing industri sawit di pasar internasional semakin meningkat. "Kalau sudah bersertifikat ISPO berarti perkebunan sawit tersebut sudah clear and clean," kata Joko.

Joko mengharapkan, selain melalui percepatan dan penguatan

sertifikasi ISPO, pemerintah juga bisa membantu menyelesaikan permasalahan atau tantangan lain yang sedang dihadapi oleh industri kelapa sawit. Salah satunya tantangan kebijakan di dalam negeri sehingga lebih harmonis mendorong kemajuan industri sawit nasional.

Sementara itu, Ketua Sekretariat ISPO Aziz Hidayat mengatakan, hingga Agustus 2019 telah 566 sertifikat ISPO yang terdiri dari 556 perusahaan, 6 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma. Luas total lahan yang telah tersertifikasi ISPO adalah 5,2 juta hektar. "Tingkat kepatuhan pekebun untuk memenuhi sertifikasi ISPO juga semakin baik. Ini hal yang sangat menggembirakan bagi kami," kata Aziz Hidayat. (*)

PRODUK BERLABEL NO PALM OIL DILARANG BEREDAR

JAKARTA - Produk makanan berlogo bebas sawit kembali muncul di masyarakat. Adalah produk Rella's Kitchen yang mencantumkan label palm oil free di beberapa produknya antara lain nut meg bar, granola energy bar, lemon biscuit, biscotti, dan produk olahan lain. Berdasarkan temuan redaksi, produk Rella's Kitchen berlabel palm oil free terpajang di sejumlah gerai Kem Chiks di Jakarta.

"Kami mengancam beredarnya produk yang mencantumkan label bebas sawit. Produk ini melukai perasaan 10 juta petani sawit di Indonesia," kata Rino Afrino, Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).

Ia mempertanyakan motif Rella's Kitchen yang menempelkan label bebas sawit di produknya. Padahal, kelapa sawit menjadi komoditas andalan dan sumber penghidupan petani di desa. Setiap hari, petani sawit mengonsumsi olahan berbahan minyak sawit mulai; faktanya kesehatan mereka tetap terjaga.

Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito, menegaskan produk yang berasal dari dalam dan luar negeri tidak boleh mencantumkan label 'No Palm Oil' atau bebas minyak sawit. Kalaupun ada, produk tersebut sudah pasti ilegal dan dilarang edar.

"Setiap ada produk di pasaran, baik pangan olahan, bisa kosmetik juga. Maka kalau ada kalimat tidak mengandung sawit, itu adalah satu produk yang ilegal," ujar Penny K. Lukito

dalam jumpa pers di Aula Gedung C BPOM, Jakarta Pusat, pada pertengahan Agustus 2019.

Penny mengajui bahwa produk 'no palm oil' tengah jadi tren, karena dianggap merusak lingkungan dan kesehatan. Tapi itu semua belum terbukti secara ilmiah atau dengan penelitian, karena tidak melulu kandungan minyak sawit berbahaya. "Produk berlabel bebas sawit akan ditarik dari pasaran," tegas Penny.

"Dikaitkan dengan implikasinya, apabila kita mencantumkan no palm oil tersebut, karena berdasarkan peraturan Badan POM yang ada, dikaitkan dengan label dilarang untuk mencantumkan pernyataan tidak mengandung sesuatu atau mengandung sesuatu," jelas Penny.

Bagi produk yang mengklaim tidak mengandung zat tertentu atau sebaliknya, sejatinya harus diperkuat dengan data atau diuji di laboratorium BPOM. Sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan dan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan. (*)





PRESIDEN JOKOWI INSTRUKSIKAN PERCEPATAN B30

Industri biodiesel mendapatkan kabar baik dari Istana Presiden. Campuran biodiesel 30% atau B30 mendapatkan dukungan penuh dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mandatori B30 perlu dipercepat untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional.

Empat hari sebelum Hari Kemerdekaan RI ke-74, Presiden Jokowi mengumpulkan tiga menteri perekonomian dan para menteri terkait dalam Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, pertengahan Agustus 2019. Dalam rapat ini, Presiden membahas kemajuan yang telah dicapai sepanjang implementasi mandatori B20. Pelaksanaan B20 sudah terbukti mengurangi impor minyak solar sehingga mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

"Kita ingin lebih cepat, dan mulai dari B20 yang mengurangi ketergantungan energi fosil. Selain

itu, penting juga mengurangi impor minyak kita," kata Presiden Jokowi.

Dalam hitungan orang nomor satu di Indonesia ini, konsistensi penggunaan B20 dapat menghemat devisa sampai US\$ 5,5 miliar per tahun. Nilai ini diperkirakan lebih besar lagi belum termasuk efek ganda terhadap konsumsi minyak sawit domestik yang berdampak positif kepada industri dan petani.

Terkait pengawasan program B20, Presiden Jokowi berencana memeriksa detail dan secara langsung urusan berkaitan penggunaan B20 ini termasuk jika ditingkatkan menjadi B30. "Saya enggak tahu apakah saya akan

gunakan BPKP atau bisa saja saya akan gunakan Price Waterhouse (Price Waterhouse Coopers, red) dan lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan," ucap Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menjelaskan bahwa implementasi B20 membuat Indonesia hemat Rp 23 triliun. Penghematan itu bersumber dari berkurangnya impor solar ke Tanah Air selama rentang waktu Januari sampai Juli pada 2019. Sementara itu, penyaluran FAME untuk B20 dalam periode sama mencapai 3,49 juta kilo liter.

"Dengan melihat harga MOPS, dikalikan volume FAME yang didistribusikan, sudah 97 persen berhasil kita salurkan FAME dari target. Ini berarti ada penghematan sekitar 1,66 miliar dolar dari Januari-Juli 2019," ujar Arcandra di Kantor Kementerian



“Yang penting komitmen semua pihak harus jalan. Kalau tidak konsisten, saya akan lapor kepada Presiden (Jokowi). Mentalitas tidak boleh hit and run,”

Ignatius Jonan // Menteri ESDM

Koordinator Perekonomian, Jakarta, pada pertengahan Agustus 2019.

Presiden juga meminta laporan nanti dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO melalui *cold processing* untuk memproduksi *green diesel*, *green gasoline* di kilang-kilang minyak milik PT Pertamina. “Saya kira kita tahu selain di Pertamina di pabrik-pabrik kelapa sawit juga perlu didorong untuk membangun *stand-alone green fuel*. Ini penting mempercepat perkembangan industri *green refinery* kita,” jelas Presiden.

Kesuksesan B20 ini mendorong Presiden Jokowi untuk meningkatkan pemakaian biodiesel di dalam negeri. Hal ini diungkapkan Menteri Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung, yang menjelaskan bahwa penerapan B20 berjalan cukup baik karena mampu terserap 97% sudah dimanfaatkan dengan baik.

“Maka Bapak Presiden memutuskan mulai 1 Oktober untuk persiapan biodiesel 30 (B30), 1 Oktober tahun 2019 ini dan nanti akan efektif dijalankan pada bulan Januari tahun 2020,” kata Pramono Anung.

Presiden, lanjut Seskab, juga menekankan untuk persiapan selanjutnya pada akhir Desember tahun 2020 maka B50 sudah harus bisa dijalankan. Menurut

Seskab, Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa untuk B100, 3 tahun dari tahun 2018 seharusnya bisa dijalankan.

Ditambahkan Seskab, beberapa poin yang ada dari hasil laporan direktur Pertamina kepada Presiden ternyata avtur yang selama ini dipermasalahan, sejak bulan Mei tahun 2019, 100% sudah bisa dipenuhi dari dalam negeri, dari Pertamina sehingga tidak ada impor.

Sebelumnya pada 13 Juni 2019, pemerintah telah melepas uji jalan (road test) kendaraan berbahan bakar B30 ditandai dengan pelepasan keberangkatan 3 unit truk dan 8 unit kendaraan penumpang berbahan bakar B30 yang masing-masing akan menempuh jarak 40 ribu dan 50 ribu kilometer.

“Road test B30 ini bukan uji jalan saja tetapi juga mempromosikan

kepada masyarakat bahwa penggunaan bahan bakar B30 performa termasuk akselerasi kendaraan tidak turun dan perawatannya tidak memakan biaya tambahan yang besar,” jelas Menteri ESDM RI, Ignatius Jonan dalam sambutannya.

Jonan mengungkapkan pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30% atau B30 pada kendaraan ini mulai tahun depan salah satunya dalam rangka mengurangi ketergantungan impor juga menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan. “Yang penting komitmen semua pihak harus jalan. Kalau tidak konsisten, saya akan lapor kepada Presiden (Jokowi). Mentalitas tidak boleh *hit and run*,” tegas Menteri Jonan.

Menteri Jonan juga menjelaskan bahwa Mandatori B30 ini juga merupakan langkah



Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menyambut baik rencana pemerintah untuk mempercepat penggunaan B30. Perusahaan biodiesel yang bergabung di APROBI menyatakan siap menjamin pasokan biodiesel di dalam negeri.

MP Tumanggor // Ketua Umum APROBI



“Kita ingin lebih cepat, dan mulai dari B20 yang mengurangi ketergantungan energi fosil. Selain itu, penting juga mengurangi impor minyak kita,”

Joko Widodo // Presiden Indonesia

konkret pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, mensejahterakan petani kelapa sawit, serta menjamin ketersediaan dan kestabilan harga BBM dalam negeri. Kendaraan penumpang akan menempuh rute Lembang - Cileunyi - Nagreg - Kuningan - Tol Babakan - Slawi - Guci - Tegal - Tol Cipali - Subang - Lembang sejauh 560 km per hari. “Sedangkan truk menempuh rute Lembang - Karawang - Cipali - Subang - Lembang sejauh 350 km per hari.

Uji jalan kendaraan B30 melibatkan Kementerian ESDM bekerjasama dengan BPDPKS, BPPT, Gaikindo, APROBI, Pertamina dan seluruh

stakeholder. Dalam kesempatan terpisah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan memonitor kualitas dan performa bahan bakar dalam kegiatan road test penggunaan bahan bakar B30 kendaraan bermesin diesel. Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan dalam pemantauan kualitas dan performa bahan bakar uji itu, turut terlibat unit kerja Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP) dan Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTBRD).

“BTBRD memastikan handling dan penyimpanan bahan bakar uji agar bebas kontaminasi, melaksanakan quality control dan

monitoring kualitas bahan bakar selama kegiatan road test,” ujar Hammam.

BTBRD berperan dalam pelaksanaan road test untuk mendukung analisis konsumsi bahan bakar baik pada kendaraan kurang lebih 3,5 ton untuk mobil maupun pada kendaraan lebih dari 3,5 ton untuk truk.

Sedangkan BT2MP berperan untuk melakukan uji pengaruh bahan bakar uji B30 terhadap unjuk kerja, emisi dan konsumsi bahan bakar serta pengaruh jangka panjang dari bahan bakar uji terhadap parameter tersebut.

MP Tumanggor, Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI) menyambut baik rencana pemerintah untuk mempercepat penggunaan B30. Perusahaan biodiesel yang bergabung di APROBI menyatakan siapa menjamin pasokan biodiesel di dalam negeri.

Sebagai informasi bahwa kapasitas terpasang produksi biodiesel mencapai 12 juta kiloliter yang dihasilkan dari 19 perusahaan. Peningkatan pemakaian biodiesel menjadi B30 diperkirakan akan menaikkan konsumsi di dalam negeri menjadi 9 juta kiloliter.

“Produsen siap mendukung program B30 yang dicanangkan pemerintah. Kapasitas produksi kami mampu penuhi kebutuhan dalam negeri,” tegas Tumanggor.

Selain itu, kalangan produsen juga bersiap-siap menambah kapasitas produksi eksisting dalam rangka mengantisipasi permintaan dalam dan luar negeri. “Adanya mandatori biodiesel mendorong pengusaha tambah investasi untuk bangun pabrik. Kami yakin kebijaka ini berdampak luas bagi perekonomian,” pungkas Tumanggor penuh optimis. (*)

BIODIESEL BERIKAN NILAI TAMBAH BAGI INDONESIA

Pemakaian biodiesel mengurangi polusi udara. Dari aspek ekonomi, Indonesia hemat devisa puluhan triliun setelah impor solar berkurang. Wajar apabila pemakaian biodiesel ditingkatkan dari B20 menjadi B30



"Ada kabar gembira setelah pemerintah mewajibkan penggunaan biodiesel. Indonesia bisa mengurangi pengeluaran gas emisi. Dan juga devisa mampu dihemat setelah impor solar ditekan. Selama ini, Indonesia banyak keluar devisa karena beli solar dari luar negeri," kata Paulus Tjakrawan, Ketua Harian Asosiasi Produsen Biofuels Indonesia (APROBI)

Informasi ini disampaikan Paulus Tjakrawan saat menjadi pembicara Program Pembekalan Fellowship Journalist Batch II di penghujung Juli 2019 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti 15 jurnalis dari media cetak dan online. Melalui presentasinya yang berjudul *Program Bahan Bakar Nabati – Biodiesel Indonesia* dipaparkan nilai tambah biodiesel dari sisi ekonomi, pengurangan emisi, dan penyerapan tenaga kerja. Sepanjang 2018, pemakaian biodiesel mengurangi emisi CO_{2e} sebesar 10,58 juta ton. Angka sebesar ini berkontribusi 27% terhadap target pengurangan emisi dari sektor energi dan transportasi. Angka ini lebih kecil dibandingkan data Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral sebesar 13,6 juta CO_{2e}. Pada 2019, diproyeksikan biodiesel mampu mengurangi emisi CO₂ sebesar 16 juta ton CO_{2e}.

"Biodiesel ini minim sulfur

dibandingkan solar. Makanya, emisi gas rumah kaca yang dikeluarkannya lebih kecil dan mengurangi polusi," tutur Paulus.

Pengurangan emisi ini sejalan dengan komitmen dalam Nationally Determined Contributions UNFCCC sebanyak 26% di tahun 2020 dan sekitar 29% pada tahun 2030. Menurut Paulus, target pengurangan emisi 2020 hampir dilupakan padahal waktunya tidak lama lagi. Saat ini, target pengurangan emisi yang lebih diperhatikan untuk 2030. "Mungkin dipikir waktunya cukup panjang sehingga belum terlalu penting", ujarnya.

Sejauh ini, pencampuran biodiesel sawit ke minyak solar sebesar 20% atau B20 dianggap telah berhasil. Paulus Tjakrawan menyebutkan produksi biodiesel sawit sepanjang tahun 2018 mencapai 6,167 juta Kl. Semua terserap dengan baik. Produksi terserap sebesar 3,750 Juta Kl untuk kebutuhan domestik dan 1,785 juta Kl untuk Ekspor.

Angka penyerapan biodiesel domestik diperkirakan lebih tinggi pada 2020. Jika, pencampuran biodiesel ditingkatkan menjadi B30. Semenjak pertengahan Juni 2019, uji jalan (road test) campuran biodiesel sawit ke minyak solar berbasis fosil sebanyak 30% (B30) telah dilakukan. Setelah penerapan B20 berhasil dan tak ada

masalah, sekarang Indonesia sudah mulai uji coba B30. Bahkan kabarnya ada intitusi pemerintah yang sudah melakukan percobaan B100 untuk beberapa kendaraan operasional.

Dikatakan Paulus bahwa pemakaian biodiesel memiliki nilai strategis dari berbagai aspek. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi juga pertahanan negara. "Tidak bagus bagi Indonesia apabila tergantung kepada bahan bakar impor. Andaikata terjadi insiden dengan negara tetangga, lalu jalur impor Selat Malaka ditutup. Maka berbahaya bagi pertahanan negara," ucapnya.

Dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia, Indonesia memiliki kemajuan pesat dalam pemakaian biodiesel. Pemerintah negeri jiran baru dapat memutuskan penggunaan B10. "Untuk Malaysia baru akan menerapkan B20 tahun 2020 nanti. Tetapi Indonesia sudah naik menjadi B30," ujar Paulus penuh bangga.

Paulus mengharapkan semua pihak bersatu menghadapi gempuran kampanye hitam terhadap sawit dan biodiesel. Pasalnya, tuduhan negatif dan hambatan ekspor tidak terlepas dari strategi perang dagang. Minyak sawit unggul dari sisi produktivitas dan harga daripada minyak nabati lain. Alhasil, sawit akan terus ditekan supaya daya saingnya tergerus dan tidak lagi mendominasi pasar minyak nabati dunia. (*)

UJI JALAN B30

TUNJUKKAN HASIL POSITIF



“Uji ini adalah bagian dari uji jalan (road test) B30 untuk menentukan nilai kandungan Monogliserida (MG) yang optimum yang akan diimplementasikan sebagai standar acuan mutu bahan bakar B30 di Indonesia,” kata Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana usai menyaksikan uji bahan B30 di lokasi pengujian perkebunan teh Tambi Wonosobo, Rabu (14 Agustus 2019).

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan proses pengujian dan pemilihan lokasi di Dieng guna menguji kemampuan bahan bakar melakukan adaptasi pada kondisi udara yang lebih dingin.

“Kami nyalakan (start ability) mesin kendaraan setelah didiamkan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Balitbang ESDM) melakukan uji presipitasi dan start ability penggunaan campuran 30 persen Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar (B30) pada kendaraan bermotor di Dataran Tinggi Dieng, Jawa Tengah sebagai rangkaian road test B30.

(soaking) bahan bakar pada corong terpisah selama periode tertentu pada kondisi udara dingin kendaraan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar B30 (dengan kandungan Monogliserida yang berbeda),” jelasnya.

Uji presipitasi, imbuh Dadan, dimaksudkan untuk mengukur berat zat dalam kandungan B30 dengan menggunakan metoda Cold Soak Filter Test (CSFT) dari ASTM D7501. Sementara, uji start ability adalah uji kemampuan

kendaraan untuk dinyalakan setelah didiamkan (*soaking*) selama beberapa hari pada kondisi udara dingin. Pengujian dilakukan pada 2 kelompok kendaraan dimana tiap kelompok terdiri atas 3 unit Toyota Innova Diesel.

Kelompok pertama dilakukan 3 kali *soaking* yaitu selama 3 hari, 7 hari, dan 14 hari. Sedangkan untuk kelompok kedua dilakukan *soaking* selama 21 hari. Uji *start ability* dilakukan di setiap akhir periode *soaking*.

“Hasil uji presipitasi menunjukkan bahwa B30 cenderung mempunyai presipitat lebih tinggi dibandingkan B0. Hasil uji *start ability* menunjukkan bahwa mobil dapat dinyalakan secara normal. Ini membuktikan bahwa B30 mengalir dengan baik di mesin walau telah didiamkan selama 21 hari pada kondisi dingin”, ungkap Dadan.

Bahan bakar yang digunakan untuk uji presipitasi dan *start ability* adalah solar murni (B0), B30 dengan kadar Monogliserida (MG) sebesar 0,4 (%-massa) dan B30 dengan kadar Monogliserida (MG) sebesar 0,55 (%-massa).

Pelaksana uji dilaksanakan oleh Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (P3tek KEBTKE) KESDM, Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas (LEMIGAS) KESDM, Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTBRD) BPPT, serta Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP) BPPT. Adapun pendanaan road test berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit.

Selain itu, uji presipitasi dan *start ability* ini mendapat dukungan lain dari industri berupa bantuan bahan bakar dari PT Pertamina (Persero) dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), serta penyediaan kendaraan uji dari Gabungan Industri

Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengatakan saat ini pabrikan telah menerapkan penggunaan B20, yang telah berlaku mulai 1 September 2018. Menurut riset yang dilakukan anggota asosiasi, di lapangan hampir tidak ada lagi solar murni.

Dalam rencana implementasi B30, industri telah melakukan uji performa, termasuk di daerah dingin, Dieng, Jawa Tengah. Hal ini disebabkan kemungkinan bahan bakar mengental karena suhu rendah dan dikhawatirkan mengganggu kinerja mesin. Namun, hasilnya tidak terdapat masalah yang berarti.

“Jadi, kami sampaikan dari produsen kendaraan Indonesia, untuk diesel kami bisa menerima rencana pemerintah untuk menggunakan B30. Namun, tentunya kami akan melakukan tes lanjutan lagi,” ujarnya dalam acara Breakfast Meeting tentang Industri Kelapa Sawit, Biodiesel, dan Permesinan Otomotif di Jakarta, Selasa 20 Agustus 2019.

Dia menjelaskan tes lanjutan ini diperlukan karena kendaraan yang dites saat ini menggunakan standar Euro 2. Pada Maret 2021, pemerintah menerapkan batasan Euro 4. “Jadi, kami perlu waktu untuk tes Euro 4. Kalau ada persyaratan yang lebih ketat, kami sampaikan ke

anggota,” kata Yohannes seperti dilansir dari *bisnis.com*.

Dia mengatakan, pada awalnya hanya tiga merek yang melakukan uji kendaraan untuk B30. Namun, asosiasi mendorong anggota lainnya sehingga terdapat tujuh merek yang melakukan tes dengan jenis kendaraan yang lebih bervariasi, dari *passenger car* diperluas hingga truk, pikap, dan lainnya.

Kendati demikian, menurutnya, masih terdapat perbedaan antara industri otomotif dengan produsen biodiesel. “Kami ingin kandungan monogliserida (MG) content bisa 0,4 ppm, tetapi produsen biodiesel masih 0,5 ppm,” katanya.

Ia mengatakan soal rencana implementasi B30 pada tahun depan, awalnya hanya ada tiga merek yang akan uji coba. Namun, kini ada 7 merek yang melakukan tes B30. Selain itu, jenis kendaraan lebih variasi, antara lain truk, *pick up*, dan penumpang akan uji coba.

Terkait mandatori B30, para produsen akan bersiap pada ketentuan batas emisi Euro 4 untuk kendaraan diesel pada Maret 2021. “Kami bangga bisa meyakinkan produsen-produsen besar kami Jepang, Eropa, Korea, karena B30 adalah yang pertama dan mudah-mudahan bisa berjalan baik,” pungkasnya. (*)



BIODIESEL TERANCAM

KEBIJAKAN PROTEKSIONISME EROPA

Eropa memainkan kebijakan proteksionisme untuk menghambat produk biodiesel Indonesia. Salah satunya memainkan penerapan bea masuk anti subsidi sebesar 8%-18% kepada biodiesel Indonesia.

Uni Eropa (UE) kembali mengeluarkan kebijakan yang merugikan produk biodiesel Indonesia. Kali ini, biodiesel Indonesia dikenakan bea masuk yang besarnya berbeda untuk masing-masing perusahaan. Pemberlakuan bea masuk ini merupakan hasil dari sengketa biodiesel antara Indonesia dan UE selama 7 tahun terakhir.

Kebijakan itu akan berlaku secara provisional (sementara) per 6 September 2019, dan ditetapkan secara definitif per 4 Januari 2020 dengan masa berlaku selama 5 tahun. Uni Eropa menuduh Indonesia memberikan subsidi untuk produk bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (*crude palm oil/CPO*) itu.

Sebelum bea masuk diputuskan, Komisi Eropa telah melakukan penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal Indonesia mulai Desember 2018. Penyelidikan ini dimulai setelah ada masukan dari Badan Biodiesel Eropa (European Biodiesel Board). Berpijak dari hasil penyelidikan itu, otoritas UE mengklaim terdapat sejumlah bukti bahwa produsen biodiesel asal Indonesia mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah, berupa pendanaan ekspor serta insentif pajak yang

berlebihan untuk ekspor CPO dan produk turunannya.

"Kebijakan ini tepat bagi industri di Eropa yang meminta persaingan pasar yang adil, sebagaimana tuntutan serupa kepada Argentina. Bea masuk ini sah diberlakukan karena Indonesia terbukti melakukan subsidi biodiesel," ujar Kepala Badan Biodiesel Eropa Kristell Guizouarn dikutip dari *Reuters*.

Terbitnya putusan ini membuat pemerintah Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada otoritas Uni Eropa (UE) atas proposal besaran bea masuk imbalan sementara produk biodiesel asal Indonesia pada Juli 2019.

"Dengan dikeluarkannya proposal pengenaan bea masuk imbalan sementara ini, Indonesia akan menyampaikan respons resmi yang menyatakan keberatan," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan.

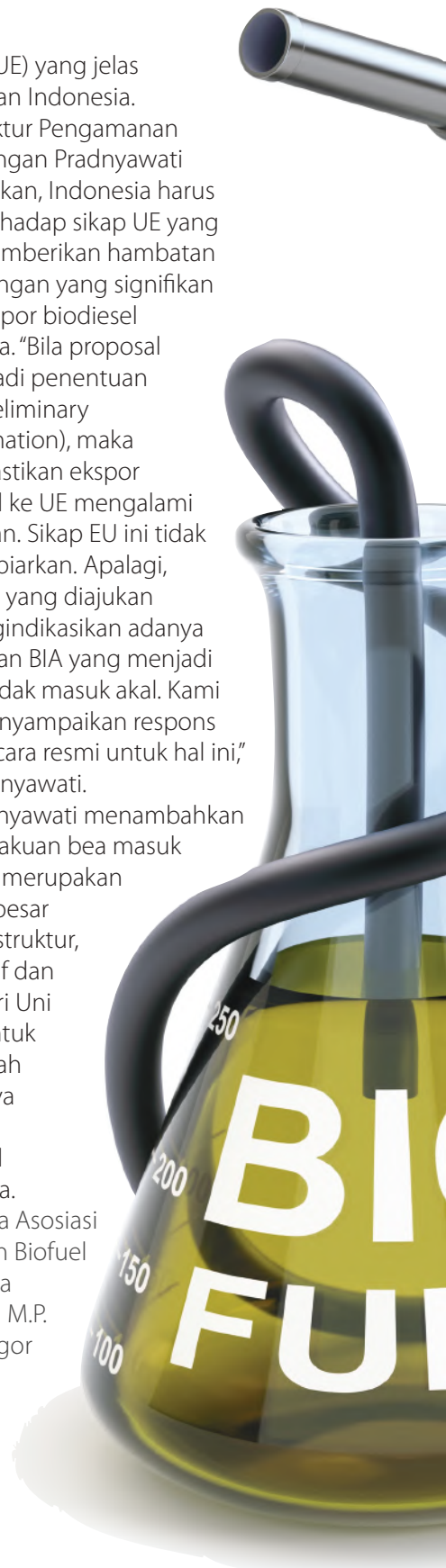
Keberatan akan difokuskan pada metode penghitungan besaran bea masuk yang diduga tidak memperhatikan fakta yang diperoleh selama penyelidikan. Pemerintah UE diduga hanya menggunakan best information available (BIA), yaitu data yang dimiliki petisioner (pemohon/

industri UE) yang jelas merugikan Indonesia.

Direktur Pengamanan Perdagangan Pradnyawati menyatakan, Indonesia harus tegas terhadap sikap UE yang telah memberikan hambatan perdagangan yang signifikan pada ekspor biodiesel Indonesia. "Bila proposal ini menjadi penentuan awal (preliminary determination), maka bisa dipastikan ekspor biodiesel ke UE mengalami hambatan. Sikap EU ini tidak dapat dibiarkan. Apalagi, proposal yang diajukan UE mengindikasikan adanya penerapan BIA yang menjadi sangat tidak masuk akal. Kami akan menyampaikan respons tegas secara resmi untuk hal ini," ujar Pradnyawati.

Pradnyawati menambahkan pemberlakuan bea masuk tersebut merupakan strategi besar yang terstruktur, sistematis dan masif dari Uni Eropa untuk mencegah masuknya produk biodiesel Indonesia.

Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) M.P. Tumanggor



menjelaskan bahwa perusahaan yang terkena dampak bea masuk anti-subsidi bisa jadi akan dipaksa untuk menegosiasikan kembali kontrak dengan pembeli di UE. Langkah tersebut kemungkinan akan mengurangi ekspor biodiesel 2019. "Semula kami menargetkan 1,4 juta ton ekspor tahun ini ke Eropa, yang kemungkinan besar tidak akan tercapai," kata Tumanggor.

Ia mengusulkan agar pemerintah mencari komoditas dari Eropa yang dapat disubstitusi dari negara lain serta tidak melanggar aturan WTO sebagai bagian

perlawanan. "Misalnya parfum atau susu kita butuh bisa dari dan Baru,"

Uni

wine yang tetapi Australia Selandia ujarnya.

Saat ini, Eropa masih memberikan waktu bagi produsen biodiesel untuk

melakukan pembelaan. Kendati demikian, Tumanggor mengatakan bahwa produsen sudah mulai menghentikan pengiriman ke Eropa.

Ekspor biodiesel Indonesia ke UE meningkat tajam dari sebelumnya US\$ 116,7 juta di tahun 2017 menjadi US\$ 532,5 juta pada 2018. Namun, pada 2019 ini, tren ekspor biodiesel Indonesia ke UE cenderung turun bila dibanding tahun 2018.

Pradnyawati melanjutkan, proposal tersebut sebenarnya merupakan ancaman kesekian kalinya yang dilakukan Pemerintah UE untuk menghambat akses pasar produk Indonesia di UE. Pada Desember 2018, European Commission (EC) menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal Indonesia. Indonesia diklaim memberikan suatu bentuk fasilitas subsidi yang melanggar ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) kepada produsen/eksportir biodiesel sehingga mempengaruhi harga ekspor biodiesel ke UE.

Pada Desember 2018, European Commission (EC) menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap biodiesel asal Indonesia. Indonesia diklaim memberikan suatu bentuk fasilitas subsidi yang melanggar ketentuan organisasi perdagangan dunia (WTO) kepada produsen/eksportir biodiesel sehingga memengaruhi harga ekspor biodiesel ke UE.

Padahal, beberapa bulan sebelumnya pasar ekspor biodiesel Indonesia ke UE juga baru terbebas dari hambatan pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD). Pada 16 Februari 2018, Court of Justice EU (CJEU) mengeluarkan keputusan yang menguatkan putusan Hakim General Court sehingga UE memutuskan membatalkan pengenaan BMAD yang mulai efektif berlaku per 16 Maret 2018. Indonesia juga telah berhasil terbebas dari pengenaan

BMAD atas impor biodiesel melalui keputusan panel Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO pada 26 Oktober 2017. Panel DSB memenangkan klaim Indonesia atas UE pada sengketa DS 480 – EU Indonesia Biodiesel.

"Perusahaan biodiesel Indonesia yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan bakunya sangatlah mandiri dan Pemerintah Indonesia tidak menyubsidi industri biodiesel nasional seperti yang dituduhkan UE. Dengan menginisiasi penyelidikan antisubsidi pada Desember 2018 dan kini mengajukan proposal pengenaan bea masuk, dapat disimpulkan bahwa UE sangat berniat menghambat ekspor biodiesel asal Indonesia," tegas Pradnyawati.

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menyampaikan protes keras kepada Pemerintah UE. Bahkan, sejak isu akan adanya penyelidikan, Indonesia telah mengambil langkah pendekatan melalui konsultasi prapenyelidikan dengan EU Case Team.

Menurut Pradnyawati, Pemerintah Indonesia bersama produsen biodiesel telah berkomitmen terus melawan Pemerintah UE dengan berpegang pada data yang sejak awal penyelidikan telah diberikan kepada penyelidik. Bila akhirnya UE tetap mengenakan bea masuk imbalan, maka upaya yang dapat dilakukan Indonesia adalah mengajukan banding ke EU General Court dan ke forum DSB WTO, seperti upaya Indonesia saat sengketa pengenaan BMAD di tahun 2017.

"Indonesia sangat bersikap kooperatif dan telah mengakomodasi semua pertanyaan UE selama penyelidikan. Pemerintah juga terus berupaya memberikan pembelaan dan melakukan langkah pendekatan melalui jalur diplomasi," pungkasnya.

Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., Menteri Perindustrian RI

PEMERINTAH BERKOMITMEN MENJAGA IKLIM INVESTASI BIODIESEL



Industri hilir sawit menjadi bagian dari sektor prioritas ekonomi nasional. Mandatori biodiesel merupakan bagian program pemerintah dalam rangka meningkatkan sektor hilir yang berjalan positif semenjak empat tahun terakhir. Nilai tambah penggunaan biodiesel telah dirasakan dari aspek ekonomi sampai lingkungan

"Kami senantiasa menjaga iklim usaha dan investasi serta memberikan dukungan agar industri hilir kelapa sawit dapat tumbuh," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian RI dalam forum bisnis bersama pelaku industri sawit di penghujung Agustus 2019.

la menambahkan Kementerian Perindustrian terus mengawal mandatori biodiesel 20% (B20), yang akan ditingkatkan menjadi B30 pada awal 2020. Selanjutnya, proyeksi penggunaan biodiesel ditingkatkan menjadi B50 dan B100 sepanjang periode 2021-2022.

"Kita perlu berbangga bahwa kebijakan mandatori biodiesel berkomposisi di atas 20% adalah yang pertama kali di dunia, dengan hasil implementasi di lapangan yang relatif baik dan lancar," ujarnya.

Menurut Airlangga, pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel

telah membawa banyak manfaat, antara lain penghematan impor BBM diesel, pengurangan emisi, dan terbukti mampu menahan jatuhnya harga CPO internasional pada saat terjadi *oversupply* pada periode tahun 2015-2016 lalu.

"Pada tataran operasional, proses transisi implementasi mandatori B20 juga berjalan lancar karena koordinasi dan kompromi teknis antara industri produsen biodiesel FAME dan industri *engine maker* pengguna B20, yang menjadi mitra Kemenperin," paparnya.

Ia menambahkan penyerapan minyak sawit lewat mandatori B30 pada 2020 untuk kebutuhan dalam negeri yang antara lain untuk biodiesel, petani kelapa sawit tidak perlu khawatir akan jatuhnya harga CPO di pasar internasional karena oversuplai.

Di program biofuel nasional, Kemenperin telah menyusun peta jalan pengembangan industri yang terintegrasi. Peta jalan tersebut dapat menjadi panduan bagi para produsen dan konsumen untuk menyusun rencana bisnisnya ke depan, termasuk dalam penguatan dan penguasaan teknologi industrinya.

"Roadmap itu dimaksudkan untuk mewujudkan industri nasional yang rendah emisi karbon dan berwawasan lingkungan," tegas Airlangga.

Menperin mengemukakan, industri *flexy fuel engine* berbasis bahan bakar nabati misalnya, diyakini dapat tumbuh berdampingan dengan industri kendaraan listrik, *hybrid*, dan yang rendah emisi lainnya. Untuk itu, Kemenperin telah mengusulkan agar Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) kendaraan ditentukan berdasarkan emisi karbon sebagai bentuk insentif bagi konsumen.

Menurut Airlangga, Revisi aturan seperti PP 41/2013 nantinya kendaraan yang menggunakan bahan bakar nabati 100 persen atau B100, akan mendapatkan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 8 persen, dibandingkan dengan

kendaraan berbahan bakar fosil dikenakan sebesar 10-15 persen. "*Flexy engine* termasuk jenis kendaraan yang bakal mendapatkan insentif dalam revisi Peraturan Pemerintah No.41/2013 tentang PPnBM," imbuhnya. Apabila kendaraan tersebut menggunakan B100, akan mendapatkan insentif maksimal 8% pada aturan baru nanti.

Lanjut Airlangga, pemerintah sedang mendorong penggunaan B100 yang setara dengan standar emisi Euro 4. "Jadi, bisa dimanfaatkan untuk biodiesel, bio gasoline, dan bio avtur. Kalau semua ini kita kembangkan, maka permintaan domestik cukup untuk menyerap industri CPO kita," tandasnya.

Untuk itu, Menperin mengapresiasi kepada tim riset Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap upaya pengembangan teknologi katalis Merah Putih, yang mampu memproduksi bahan bakar hijau (*green fuel*) berupa bensin hijau, diesel hijau, dan avtur hijau langsung dari minyak sawit (*drop in biofuel*).

"Kami sangat menaruh perhatian pada proses produksi *green gasoline*, di mana tren konsumsi bahan bakar mesin bensin selalu meningkat. Selain itu juga menghasilkan produk samping ELPIJI hijau, yang akan mendukung rancangan Bauran Energi Nasional yang berbasis energi baru terbarukan," terangnya.

Pemerintah akan mengamankan kebijakan hilir sawit antara lain pengamanan bahan baku berupa tarif bea keluar dan dana perkebunan yang pro industri, serta insentif fiskal dan nonfiskal. Menteri Airlangga menuturkan, fasilitas perpajakan telah disiapkan yang telah disosialisasikan kepada seluruh pihak khususnya calon investor dalam negeri. Tujuannya adalah pelaku industri dapat berpartisipasi membangun kedaulatan energi nasional melalui industri bahan bakar hijau berbahan baku minyak sawit langsung

Menperin optimistis, Indonesia



punya potensi dan peluang besar dalam menjalankan program hilirisasi industri kelapa sawit dan pengoptimalan penggunaan bahan bakar nabati. Sebab, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar CPO dan minyak inti sawit mentah (*Crude Palm Kernel Oil/CPKO*) yang mencapai 47 juta ton pada tahun 2018.

"Laju pertumbuhan produksi minyak sawit diperkirakan terus meningkat signifikan, di mana ekspor minyak sawit dan produk turunannya menyumbang devisa negara lebih dari USD22 miliar per tahun," ungkapnya.

"Peningkatan penggunaan CPO terus meningkat, untuk energi sekitar 15-20%. Sisanya untuk produk hilir seperti pangan dan nonpangan. Kita sudah buat *roadmap*-nya dalam pengembangan industri nasional," ungkap Airlangga.

Sepanjang tahun 2018, ekspor minyak sawit didominasi oleh produk hilir, yang rasio volumenya sebesar 81% dibanding ekspor bahan baku (19%). Tren ini terus melonjak selama lima tahun terakhir, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan pada perolehan devisa. (*)



MENTERI JONAN PERLUAS KERJASAMA ENERGI HIJAU DENGAN JEPANG

Dalam kunjungan ke Jepang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertemu Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang Hiroshige Seko untuk membicarakan pengembangan green energy (energi hijau) yang berkelanjutan, salah satunya berbasis produk kelapa sawit.

"Kita minta Jepang mendukung adanya standar yang digunakan oleh industri kelapa sawit kita, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), tidak menggunakan semata-mata standar lain yang seperti Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)," ujar Jonan dalam pertemuan tersebut pada akhir

Agustus 2019.

Jonan mengungkapkan pada dasarnya pihak Jepang menyepakati usulan tersebut dengan membentuk tim bersama yang akan melakukan studi teknis lebih lanjut. "Jadi respon pihak Jepang juga sepakat, jadi mereka akan melakukan studi secara teknis bersama tim Indonesia," ungkapnya.

Pada kunjungan kerja tersebut, Menteri ESDM turut didampingi Dubes Indonesia Arifin Tasrif, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi FX Sutijastoto, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) Dono Boestami, dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia MP Tumanggor.

Kepala BPDP KS Dono Boestami menambahkan, sudah semestinya Jepang juga menggunakan ISPO karena mandatori wajib bagi pengusaha-pengusaha sawit Indonesia. "Sementara RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) itu lebih voluntary, sukarela sifatnya," tutur Dono.

Komisioner ORI Laode Ida pun



turut menegaskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak ada lagi yang melanggar prinsip lingkungan. "Indonesia tidak lagi menolerir pengembangan perkebunan kelapa sawit yang tidak memperhatikan lingkungan," kata Laode yang mengawasi urusan perkelapasawitan tersebut.

Pada kesempatan itu, Menteri Jonan mengundang Menteri Seko untuk menghadiri Forum Energi Indonesia-Jepang yang akan diselenggarakan di Bali, 10 Oktober mendatang. Selain akan membahas soal sisi perdagangan bisa dibahas soal investasi energi Jepang di Indonesia. "Karena ini adalah undangan dari Bapak Menteri, saya akan menjadwalkan untuk menghadiri forum energi tahunan di Bali nanti," ujar Seko.

Menteri Seko memang menanyakan kelanjutan dari rencana pengembangan Blok Abadi, Masela yang diberikan kepada Inpex, Jepang. Jonan mengatakan, pemerintah

Indonesia sudah setuju untuk memperpanjang masa kontrak hingga 2055 dan saat ini terus dipersiapkan berbagai masalah yang bisa menghambat baik isu sosial maupun politik.

Mengenai pengembangan *floating storage* LNG di Indonesia Timur dan Tengah, Jonan mengatakan, pemerintah masih terus melakukan kajian. "Saya meminta Jepang untuk proaktif karena selain Jepang ada perusahaan Eropa dan Korea yang berminat untuk mengembangkannya," tutur Jonan.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Jonan mengungkapkan, ada empat cara yang dapat ditempuh guna menekan laju impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memperbaiki neraca perdagangan.

"Ada empat cara menekan laju impor BBM, yaitu kendaraan listrik, menggunakan transportasi umum, pengenaan pajak yang tinggi untuk kendaraan CC besar, dan menggunakan *renewable energy*, (Energi Baru Terbarukan)," kata Ignasius Jonan.

Langkah-langkah tersebut diyakini Jonan akan mampu menghemat devisa negara, terutama saat nilai tukar rupiah terhadap dolar sedang bergejolak. Khusus pemanfaatan EBT, Jonan menjelaskan, saat ini Pemerintah sudah menerapkan kebijakan penggunaan campuran biodiesel ke dalam BBM jenis solar sebesar 20% atau yang dikenal dengan sebutan B20.

"Sejak 2018 sudah diterapkan B20 tapi hanya untuk yang subsidi, tapi akhirnya diterapkan semua.

Sekarang diterapkan lagi secara penuh, sebesar 20% dari total minyak solar yang dipakai baik subsidi maupun tidak dengan kadar CN yang di bawah 50," ungkapnya.

Jonan menegaskan, strategi ini dinilai cukup efektif dalam mengurangi jumlah impor BBM, mengingat masih tingginya jumlah konsumsi solar di Indonesia.

"Ini ampuh karena konsumsi solar kita di bawah CN 50 itu kurang lebih 30 juta kilo liter (KL) atau 30 miliar liter setahun. Kalau dicampur 20% berarti kita menghemat sekitar 6 juta KL/tahun," urainya.

Melihat keberhasilan ini, Pemerintah akan meningkatkan penggunaan biodiesel menjadi B30 pada tahun 2020 yang diperkirakan akan menghemat sekitar US\$1,5-1,7 miliar per tahun dengan menyesuaikan harga minyak. "Tahun depan, Presiden sudah minta. Kita (Kementerian ESDM) sudah siapkan B30," jelas Jonan.

Menurut Jonan, penerapan kebijakan ini seyogyanya juga diikuti penyesuaian yang dilakukan di industri otomotif. "Industri otomotif harus adjust untuk filter mesin atau lainnya," ungkapnya.

Tingginya harga biodiesel, kata Jonan, masih menjadi tantangan. Namun, ia meyakini transisi peralihan ini akan berjalan seiring penyesuaian harga biodiesel.

"Tantangannya adalah harga. kalau kelapa sawit diubah 100 persen ke biodiesel harganya sekitar 1 USD (Rp14.000) atau 1 Euro (Rp16.000) per liter," urainya.

Di penghujung diskusi, Pemerintah menegaskan komitmen ketersediaan energi dengan harga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. "Dua hal ini akan tercapai jika kita cepat mengentaskan kemiskinan," pungkas Jonan. (*)

PEMERINTAH SEBAIKNYA MEMPERKUAT HARMONISASI REGULASI



Pemerintah diminta menjaga iklim investasi supaya lebih kondusif. Sebaiknya tidak perlu ada diri pernyataan kontroversial yang dapat memperburuk imej sawit semakin terpuruk di pasar global.

Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Manggabarani mengingatkan, pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara regulasi agar tidak saling bertabrakan dan menahan pernyataan-pernyataan yang bisa memicu kontraversi. Membangun citra positif sawit di dalam negeri seharusnya menjadi prioritas ditengah tekanan pasar global terhadap industri sawit Indonesia. Seperti diketahui, berbagai persoalan seperti kewajiban plasma 20 persen, kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU), dan konflik lahan dipicu oleh sejumlah regulasi yang bersinggungan dan tidak sinkron antara satu kebijakan dan kebijakan lain.

"Ini bukan soal benar atau salah, tapi harus dilihat dan dipertimbangkan dasar regulasi yang dipakai agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi dan menjadi keterlanjuran yang sulit diperbaiki. Apalagi semua regulasi tidak berlaku surut. Disisi lain, pemerintah tengah bekerja

keras membangun kampanye positif sawit di pasar global," katanya.

Manggabarani mengungkapkan, kewajiban membangun dan bermitra dengan plasma ada sejak tahun 2007 seiring terbitnya Permentan No 26/2007. Permentan itu mengacu kepada UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengamankan Perkebunan Besar Swasta (PBS) maupun Perkebunan Besar Nasional (PBN) membangun plasma sebesar 20% dari luas konsesi.

"Jadi swasta yang membangun kebun sebelum tahun 2007 tidak wajib membangun kebun plasma, karena memang tidak ada aturan yang mewajibkannya. Apalagi Permentan tersebut tidak berlaku surut. Sayangnya, ada persepsi yang keliru seolah-olah banyak PBS dan PBN tidak mentaati peraturan tersebut," kata dia.

Persoalan lain, kata Manggabarani, kewajiban plasma 20 persen punya telaah dan versi yang berbeda-beda antara instansi. Ada instansi yang mengatur bahwa plasma 20% dihitung berdasarkan luasan HGU, namun ada pula yang mengatur berdasarkan dari luasan areal yang ditanam.

Persoalan ini juga menjadi tidak mudah karena Kementerian Pertanian mensyaratkan lahan plasma harus berada luar HGU. Padahal untuk mencari lahan di luar HGU yang clear and clean bukan persoalan yang mudah karena adanya ketimpangan penguasaan lahan, ujar dia.

Masalah tidak berhenti sampai disitu. Regulasi yang terbit belakangan,

kata Manggabarani ikut memicu persoalan baru di perkebunan sawit. Sejak awal, kebun sawit berasal dari Area Penggunaan Lain (APL) yang kemudian disertifikatkan menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Persoalannya, tiba-tiba muncul pasca regulasi kehutanan yang mengubah tata ruang dan menetapkan kawasan HGU tersebut menjadi hutan lindung.

Manggabarani mengungkapkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) juga menjadi komitmen dari perkebunan sawit di Indonesia untuk melakukan penanaman secara berkelanjutan. Hingga kini, setidaknya ada 3-4 juta hektar perkebunan sawit besar telah bersertifikat ISPO.

Untuk mendapatkan sertifikat ISPO, banyak persyaratan yang harus ditaati termasuk lahan yang clear and clean. Karena itu, klaim 81 persen perkebunan tidak mengikuti tata kelola perkebunan sawit agak diragukan karena tidak sejalan dengan kebijakan lain yang diberlakukan Pemerintah melalui ISPO.

Terpisah, pengamat hukum kehutanan dan lingkungan DR Sadino mempertanyakan tolak ukur penetapan baik dan tidak baik untuk perusahaan perkebunan. Pernyataan ini untuk menanggapi langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) atas perizinan, sertifikasi dan implementasi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta kesesuaiannya dengan kebijakan dan ketentuan internasional. Dalam pemeriksaan tersebut, BPK menemukan masih ada jutaan hektare lahan sawit yang bermasalah

Sadino mengatakan BPK seharusnya punya standar perkebunan yang baik sebelum menjustifikasi pernyataan yang bisa memicu kontroversi publik. Di sisi lain, BPK perlu memahami bahwa banyak regulasi terkait sawit yang tidak harmonis.

"Ini yang pertama harus dibenahi dan bukan membuat pernyataan-pernyataan yang bisa memicu kontroversi. Jangankan swasta, perusahaan negara saja, bisa kacau balau jika regulasinya tidak konsisten," kata Sadino.

BPK, lanjut Sadino perlu menjangkau semua regulasi dan tidak hanya menjadikan satu atau dua regulasi sebagai pijakan. Pendapat BPK dengan mengkaji semua regulasi juga harus komprehensif agar tidak menimbulkan salah tafsir. (*)